

Lokakarya Optimalisasi Kinerja PPID Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIARAN
STATISTIK DAN PERSANDIARAN

JL. AHMAD YANI NO.1, 92812, EMAIL : kominfoselayar@gmail.com
BENTENG



DISKOMINFO-SP KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng Selayar

E-mail : • koinfo@kepulauanseyarkab.go.id
• ppid.selayar1@gmail.com

Website : • kepulauanseyarkab.go.id
• <https://ppid.kepulauanseyarkab.go.id/>



Daftar Isi Kegiatan Lokakarya Optimalisasi Kinerja PPID Tahun 2024

1. Surat Kegiatan
2. Daftar Hadir
3. Notulen
4. Foto-Foto/ Gambar

SURAT KEGIATAN



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Benteng, 9 Desember 2024

Nomor : 005/403/XII/2024/Diskominfo-SP
Lampiran : 1 (Satu) Exp
Perihal : **Undangan**

Yth. Para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
(Daftar Terlampir)

di

Tempat

Dalam rangka optimalisasi kinerja PPID Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyambut pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Kominfo-SP bekerjasama dengan USAID ERAT akan melaksanakan kegiatan **Lokakarya Optimalisasi Kinerja PPID Kabupaten Kepulauan Selayar**. Untuk itu, mengingat pentingnya kegiatan ini maka sesuai daftar terlampir diharapkan untuk menghadiri kegiatan dengan membawa DIP (Daftar Informasi Publik) dan Daftar Informasi yang di kecualikan (DIK) yang sudah di ttd/te serta membawa Laptop yang Insyaa Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis - Jumat, 12-13 Desember 2024
Waktu : Pukul 08:30 WITA - Selesai
Tempat : Hybrid di Hotel Rayhan Square Selayar

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



H. MUH. BASLI ALI

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Selawesi Selatan
Telp. (0414) 21001, Faximile (0414) 21323



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Lampiran Surat

Nomor : 005/403/XII/2024/Diskominfo-SP

Tanggal : 9 Desember 2024

Kepada Yth :

1. Admin PPID Sekretariat Daerah (1 orang)
2. Admin PPID Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (1 orang)
3. Admin PPID Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (1 orang)
4. Admin PPID Inspektorat Daerah (1 orang)
5. Admin PPID Dinas Kesehatan (1 orang)
6. Admin PPID Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (1 orang)
7. Admin PPID Sekretariat DPRD (1 orang)
8. Admin PPID Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (1 orang)
9. Admin PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (1 orang)
10. Admin PPID Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (1 orang)
11. Admin PPID Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (1 orang)
12. Admin PPID Dinas Sosial (1 orang)
13. Admin PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1 orang)
14. Admin PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (1 orang)
15. Admin PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (1 orang)
16. Admin PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (1 orang)
17. Admin PPID Dinas Perhubungan (1 orang)
18. Admin PPID Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (1 orang)
19. Admin PPID Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (1 orang)
20. Admin PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (1 orang)
21. Admin PPID Dinas Perpustakaan & Kearsipan (1 orang)
22. Admin PPID Dinas Perikanan (1 orang)
23. Admin PPID Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (1 orang)
24. Admin PPID Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (1 orang)
25. Admin PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah (1 orang)
26. Admin PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (1 orang)
27. Admin PPID RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar (1 orang)
28. Admin PPID Kecamatan Benteng (1 orang)
29. Admin PPID Kecamatan Bontomatene (1 orang)
30. Admin PPID Kecamatan Buki (1 orang)
31. Admin PPID Kecamatan Bontomanai (1 orang)
32. Admin PPID Kecamatan Bontoharu (1 orang)
33. Admin PPID Kecamatan Bontosikuyu (1 orang)



34. Admin PPID Kecamatan Pasimasunggu (1 orang)
35. Admin PPID Kecamatan Pasimasunggu Timur (1 orang)
36. Admin PPID Kecamatan Takabonerate (1 orang)
37. Admin PPID Kecamatan Pasimarannu (1 orang)
38. Admin PPID Kecamatan Pasilambena (1 orang)
39. Kelompok Disabilitas (3 orang Khusus Hari Pertama)
40. PPID Utama Dinas Kominfo SP (5 orang)
41. USAID ERAT (3 orang)
42. Panitia 1 & Notulen 1 (2 orang)
43. Tim IT (2 orang)



BERITA ACARA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID UTAMA)

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

BERITA ACARA HASIL KEGIATAN

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Hybrid Hotel Rayhan Square Selayar telah dilakukan kegiatan Lokakarya Optimalisasi Kinerja PPID Kabupaten Kepulauan (Daftar Hadir terlampir) dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) masing-masing PPID Pelaksana Tahun 2024
2. Penetapan Daftar Informasi Publik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Demikian berita acara kegiatan ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Selayar, 13 Desember 2024

Mengetahui,
Kepala Bidang Humas IKP,

ANDI SANDRA ESTY ABRIANY, S.E. M.M.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP.19830923 200903 2 007

DAFTAR HADIR



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jln. Jend. Ahmad Yani No.1 Benteng 92812 Sulawesi - Selatan
Fax (0414) 21463 : www.kepulauanselayarkab.go.id Email : kominfo@kepulauanselayarkab.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

No.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	KET
1	Sulemawati	Psud Hayyung	1.	
2	Nuraen	DITPIAGICUM	2.	
3	AHRIDUSA	DINSOS	3.	
4	M. RAFIUDIN NUR	DUKCAPIL	4.	
5	ALVIAN SENLY	Bappelitbangla	5.	
6	SRI ULFA FERU'ANI	BFP5DM	6.	
7	ARPA WIJAYA	BPKRD	7.	
8	DARMAWATI	Kec. Bontostikryu	8.	
9	SUDIRMAN	DINAS PUTR	9.	
10	MUR SYAMUJ	Kec. Buntomanaw	10.	
11	BAU SAHRA	DLH	11.	
12	Suryani	Bapesbangpol	12.	
13	FAKIRUDDIN	DPK	13.	
14	MUDDASSIR		14.	
15	MUR ASDINA	DISTANKP	15.	
16	Bedi Aswara	SP3D	16.	
17	Nurcahy	Kec. Bontomanaw	17.	
18	Kamar Fital	Disper	18.	
19	ISRAWATI	DP3AP 2 KB	19.	
20	Trawati Mas	Kec. Bontoharu	20.	
21	MUH. FADAR	Kec. TAKABONEPATE	21.	
22	Nisrawati	Kec. Posilambena	22.	
23	ADY KURNIA Np.	DISPARBUD	23.	
24	FITRAFI	Kec. Benteng	24.	

25	Heri	D PMP7SP	25. Heri	
26	Isyamu Hakim	Disperkim	26. Isy	
27	Ananta Widyatuli	Inspektorat	27. 	
28	Rosmari	Instakpa	28. 	
29	DARWIS	Dishub	29. 	
30	HASMAH HUSGRI	DSPMPD	30. 	
31	ANDI NUR ISRAYANTI	kec. pasimaranu	31. 	
32	MUH. RAMLI	kec. Bulq	32. 	
33			33.	
34			34.	
35			35.	
36			36.	
37			37.	
38			38.	
39			39.	
40			40.	
41			41.	
42			42.	
43			43.	
44			44.	
45			45.	
46			46.	
47			47.	
48			48.	
49			49.	
50			50.	
51			51.	
52			52.	

53			53	
54			54	
55			55	
56			56	
57			57	
58			58	
59			59	
60			60	
61			61	
62			62	
63			63	
64			64	
65			65	
66			66	
67			67	
68			68	
69			69	
70			70	

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

ANDI SANDRA ESTY ABRIANY, S.E, M.M.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP.19830923 200903 2 007

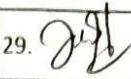
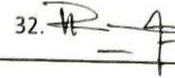
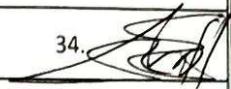


PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng 92812 Sulawesi - Selatan
Fax (0414) 21463 : www.kepulauanselayarkab.go.id Email : kominfo@kepulauan-selayarkab.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

No.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	KET
1	Xucastari	kec. Bontomatene	1.	
2	Xhur Syamsi	kec. Bontomatene	2.	
3	ROSMIAH	MSD Tjara	3.	
4	Alvira Saly	Bappeda Bangda	4.	
5	M. RAHUDDIN NUR	DISDUKCAPIL	5.	
6	FIRRIANI	kec. Benteng	6.	
7	APPA WIJAYA	BKPKPD	7.	
8	AHMANSYA	DINSOR	8.	
9	ISYAWI HAKIM	Disperkim	9.	
10	ADY KURNIA NUGRAHA	DISPARBU	10.	
11	APRIANA LAMAN	KSPRO	11.	
12	FAIKHUDDIN	DPK	12.	
13	Sulemawati	RSUD Hanyung	13.	
14	SRI ULFA FERLIANI	BKPSDM	14.	
15	Sudirman	Binas PU	15.	
16	Heri	Binas PRATSP	16.	
17	NUR ASDINA, S.P	DINAS PERTANIAN	17.	
18	Suryani	Bakesbangpol	18.	
19	MUH. FAJAR	kec. TALAKSONGRATE	19.	
20	ISRAWATI	DP3AP2KB	20.	
21	MUDDASSIR	kec. perimata	21.	
22	Kamar Pitrah	Dinas Peribum	22.	
23	Muli Husan	Dinkes	23.	
24	DENMAWATI	kec. Bontomatene	24.	

25	ANANTA WIDYASUTTI	Ingelctorat	25. 
26	NISRAWATI	Kec. Pasirbanda	26. 
27	BAU SAHRA	PLH.	27. 
28	ANDI MUR ISRAYANTI	Kec. Pasimarannu	28. 
29	ALIFAH SYETANI DAMAT	Duta Perikanan	29. 
30	HASRIAH NINGSI	DIS/MD	30. 
31	Emardi Tamat	Satpol PP	31. 
32	Irawati Mas.	Kec. Bontoharu	32. 
33	DAN PERDANA		33. 
34	Budi Aswan	SPBD	34. 
35			35.
36			36.
37			37.
38			38.
39			39.
40			40.
41			41.
42			42.
43			43.
44			44.
45			45.
46			46.
47			47.
48			48.
49			49.
50			50.
51			51.
52			52.

53			53	
54			54	
55			55	
56			56	
57			57	
58			58	
59			59	
60			60	
61			61	
62			62	
63			63	
64			64	
65			65	
66			66	
67			67	
68			68	
69			69	
70			70	

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

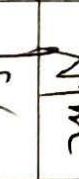
ANDI SANDRA ESTY ABRIANY, S.E, M.M.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP.19830923 200903 2 007

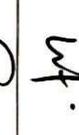
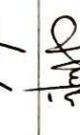
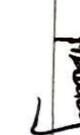
Daftar Hadir Peserta Lokakarya
Optimalisasi Kinerja PIDK Kabupaten Kepulauan Selayar
Hotel Rayhan Square Selayar, 12 - 13 Desember 2024



No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Usia (Tahun)	Institusi / Lembaga	Jabatan	Nomor Telepon	Disabilitas (Y/T)	Tanda Tangan	Tanda Tangan
1.	KUESARI	L	42	KEC. BONGMANGA	KORANAS	085343015302	T		
2.	YUK SYURI	L	45	KEC. BANTOMANA	KASI	085658205005	T		
3.	DESMITA	P	47	DISOLKOR	STAF	081241280289	T		
4.	ALVIAN Sedy	L	30	Bogorsetengah	STAF	08578532338	T		
5.	M. RAHUDDIN AUR	L	37	DISDUCCAPIL	STAF	085757251663	T		
6.	FIRRIANI	P	26	KEC. BANTONG	STAF	082349640154	T		
7.	ARRO WIGYAN	L	45	BRKAD	STAF	085396761330	T		
8.	AHRIANSA	L	36	DIN SOS	STAF	085314142018	T		
9.	ISKANDI HAKIM	P	36	DISPERKIM	STAF	082145647337	T		
10.	ADY KURNIA N.	L	35	DISPARKBUD	HEMANS	0811116625	T		



Daftar Hadir Peserta Lokakarya
Optimalisasi Kinerja PIDKabupaten Kepulauan Selayar
Hotel Rayhan Sgure Selayar, 12 – 13 Desember 2024

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (LP)	Usia (Tahun)	Institusi / Lembaga	Jabatan	Nomor Telepon	Disabilitas (Y/T)	Tanda Tangan	Tanda Tangan
11.	APRIANA Usman	P	41 THN	BPRKD	Kesbang. Hukum, Perencanaan & Pelaporan	085 242 260 993	T		
12.	FAKHRUDDIN	L	42	DPK	Kesbang. Pelaporan	085 343 695 720	T		
13.	Salemanwah, stn	P	39	Pseud Happyng	Staf Program	082238815968	T		
14.	SEI UFA FERUANI	P	33	BKPSDM	Asst. SODMA A/C Kerjasama	082190373062	T		
15.	Sukirwan	L	57	Binas PU	Kasubag. Umpegkum	081245544911	T		
16.	Heri	L	25	Dinas Propper	stn	081241807344	T		
17.	NUR ASDINA, S.P	P	37	DINAS PERTANIAN	Admin P110	081527221664	T		
18.	Saryani	P	29	Batesbangpol	Staf	081372609118	T		
19.	TIUH. FASAR	L	41	Kec. TAKABONTATE	KASI. BERSARAG	085 257061 882	T		
20.	ISPAWATI	P	39	DP3UP2K3	Staf	081314277840	T		



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA

**Daftar Hadir Peserta Lokakarya
Optimalisasi Kinerja PPID Kabupaten Kepulauan Selayar
Hotel Rayhan Square Selayar, 12 – 13 Desember 2024**



No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Usia (Tahun)	Institusi / Lembaga	Jabatan	Nomor Telepon	Disabilitas (Y/T)	Tanda Tangan	
								12/12/24	13/12/2024
21.	MUDDASSIR	L	49	Kec. Pasimung	Wakil	082197871818	T		
22.	Muhammad	L	56	Pinkis	sekretaris	0872733416	T		
23.	Kaur Fikah	L	36	Dispor	Staf	08219890142	T		
24.	Darmawan	P	45	Kec. Ransawatu	Kasub Purn	081355511578	T		
25.	ANANTA WIDYASTUTI	P	27	Inspektat	Auditor	085696976196	T		
26.	Nisrawati	P	29	Kec. Pasimung	Staf	085825008887	T		
27.	BAU SAHRA	P	54	DLH.	KASUBA6.P206	085242320555	T		
28.	ANDI UUR ISRAYANTI	P	40	Kec. Pasimung	Staf.	082393018406	T		
29.	HASYAH HATOSI	P	36	DISPUB	Staf	085292999096	T		
30.	Kusur Tika Adinata	L	46	Diskominfosp	Fungsional Kecamatan/IT	08154305886	T		



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



Daftar Hadir Peserta Lokakarya
Optimalisasi Kinerja PIDK Kabupaten Kepulauan Selayar
Hotel Rayhan Squire Selayar, 12 - 13 Desember 2024

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Usia (Tahun)	Institusi / Lembaga	Jabatan	Nomor Telepon	Disabilitas (Y/T)	Tanda Tangan	
								12/12/24	13/12/2024
31.	Andy ani	P	38	SETDA	sal do / staf	082343980131	T		-
32.	AUNYAH OBTAKAI AHTAKY	P	33	DIKAS PERUMBAK	STAF	081241205216	T		
33.	HSOJEW DHTI. SH	L	62	wabur	wabur	082247489000	T		-
34.	Fernardin Tamari	L	44	Satpol PT	Katuga umum	082344782235	T		-
35.	NURMIYANTI	P	48	BENTENG SIKU	PPDI	089356403289	Y		-
36.	Transakti Mas.	P.	50	Kec. Bonbharu	staf.	085299176026	T		
37.	ANDI IRIFAN	P	28	kec Benteng	PPDI	081343793883	Y		-
38.	ANDI NUR HIKMA	P	22	Kec. Benteng	PPDI	08575436969	Y		-
39.	YUSWIATI	P	39	Humas Dikominfo	Fungsional	08114222442	T		
40.	ABDOL RAHMANN	L	53	KOMINFO	Staf	082248169668	T		

Daftar Hadir Peserta Lokakarya
Optimalisasi Kinerja PIDK Kabupaten Kepulauan Selayar
Hotel Rayhan Square Selayar, 12 - 13 Desember 2024



No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Usia (Tahun)	Institusi / Lembaga	Jabatan	Nomor Telepon	Disabilitas (Y/T)	Tanda Tangan	
								12/12/24	13/12/2024
41.	DARWIS	L	42	DISHUB	STAF	082345958 121	T		
42.	Astamin Sidiq	L	52	Keinpo	Asst.	082256202	T		
43.	MURWAHIDIN	L	41	DISKOMINFO-SP	PEAHUM	085824115815	T		
44.	SYAHMAN NUR	L	46	Keu Kominfo	Manj	082346982888	T		
45.	RIZAL	L	49	Keu Kominfo	Grup	0811422696	T		
46.	FIRMAN	L	49	DISKOMINFO	STAF	081342370105	T		
47.	AAN PERIYANTH	L	43	DISKOMINFO	STAF	089190523331	T		
48.	ZAENAL ARIFFIN	L	32	Diskominfo	STAF	085399688999	T		
49.	NURANI, RIMAH	P	51	Disdagteam	Kashtag.	081241067673	T		
50.	Budi Aswan	L	38	PSPD	Staf	005827677094	T		

NOTULEN



NOTULENSI

LOKAKARYA OPTIMALISASI KINERJA PPID KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Pada Hari Kamis tanggal Dua Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat USAID ERAT bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Bidang Humas dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan melibatkan Puspen Kemendagri dan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan **LOKAKARYA OPTIMALISASI KINERJA PPID KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR** bertempat di Hotel Rayhan And Square jalan Ahmad Yani Benteng Selayar.

Berikut Proses Pelaksanaan Kegiatan Bimtek:

WAKTU	KEGIATAN	CATATAN PROSES
Hari Kamis 12 Des 2024 09.00 Wita	HARI PERTAMA PEMBUKAAN	Baharuddin Solongi Fasilitator Usaid Erat Mengantar Acara Lokakarya ini dengan mengajak hadirin untuk membaca Basmalah dan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ijinnya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. selanjutnya ia kemudian mempersilahkan Kabid Humas Diskominfo-SP selaku Panitia Pelaksana untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Lokakarya.
	LAPORAN PANITIA PELAKSANA	Andi Sandra Esty Abriany, S. E., M M. Kabid Humas Diskominfo - SP Mengawali dengan menyampaikan hormat kepada para undangan yang hadir, Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, dan Para Pendamping dan Fasilitator Dari USAID ERAT dilanjut dengan ucapan puji syukur. Selanjutnya ia menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan membacakan Laporan Tertulis Kadis Kominfo-SP, Berikut Laporrannya : <i>Hadirin yang berbahagia</i> Mengawali kesempatan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran tuhan yang maha esa, karena atas perkenan-nya jualah sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir bersama-sama dalam Acara Lokakarya Optimalisasi Kinerja Ppid Kabupaten

WAKTU	KEGIATAN	CATATAN PROSES
		<p>Kepulauan Selayar Tahun 2024.</p> <p>Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, Nabi yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh peradaban.</p> <p>Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan lokakarya optimalisasi kinerja PPID Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, sebagai berikut :</p> <p>A. Dasar pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; 2. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik <p>B. Waktu dan tempat pelaksanaan :</p> <p>Pelaksanaan kegiatan lokakarya optimalisasi kinerja ppid tahun 2024 bertempat di hotel rayhan square selayar selama 2 hari, mulai kamis 12 desember sampai jum'at 13 desember 2024</p> <p>C. Tujuan kegiatan :</p> <p>Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan lokakarya hari ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk meningkatkan kapasitas admin ppid masing – masing perangkat daerah (opd) di kabupaten kepulauan selayar dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam portal ppid yang ramah disabilitas; 2. Perbaikan keterbukaan informasi publik kepulauan selayar berdasarkan hasil monev kip tahun 2023; 3. Menghimpun masukan untuk upaya peningkatan jumlah kunjungan dan permintaan informasi di web ppid pemerintah kabupaten kepulauan selayar. <p>D. Kegiatan :</p> <p>Kegiatan lokakarya optimalisasi kinerja ppid tahun 2024, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan portal/website ppid yang ramah disabilitas dan strategi peningkatan jumlah kunjungan dan permintaan informasi di web ppid 2. Diskusi perbaikan keterbukaan informasi publik kepulauan selayar berdasarkan hasil monitoring evaluasi komisi informasi provinsi sulawesi selatan tahun 2023 yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> A. Sarana dan prasarana B. Digitalisasi C. Jenis informasi

WAKTU	KEGIATAN	CATATAN PROSES
		<p>D. Kualitas informasi E. Komitmen organisasi F. Inovasi dan strategi 3. Penyusunan rencana tindak lanjut</p> <p>E. Anggaran : Anggaran untuk kegiatan lokakarya optimalisasi kinerja ppid tahun 2024 bersumber dari apbd kab. Kepulauan selayar.</p> <p>F. Penutup : Demikian yang dapat kami laporkan dan atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih kepada bupati kepulauan selayar, ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada komisi informasi provinsi sulawesi selatan dan usaid erat yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan , serta seluruh pihak yang memberikan dukungan dan kontribusi atas pelaksanaan kegiatan lokakarya optimalisasi kinerja ppid tahun 2024 kabupaten kepulauan selayar. Terakhir, kami mohon perkenan bupati kepulauan selayar untuk memberikan sambutan serta arahan. SEKIAN DAN TERIMA KASIH WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.</p>
	SAMBUTAN PERTAMA	<p>Sarwansyah Sahabuddin (Provincial Government Advisor USAID ERAT Sulawesi Selatan)</p> <p>Dalam kesempatannya ia menyebut bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Pemerintah Kabupaten /Kota yang Pengelolaan PPID –nya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, berharap ini terus meningkat dan lebih dioptimalkan dari tahun ketahun.</p> <p>Mewakili USAID ERAT ia Menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan Koordinasi yang baik dari Pemkab Selayar, sehingga beberapa kegiatan Pendampingan USAID ERAT dalam rangka tata kelola pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien dan kuat.</p> <p>Apresiasi juga disampaikan atas kehadiran Ketua Komisi Informasi Perovinsi Sulawesi Selatan dan juga kepada seluruh peserta yang hadir.</p>
	SAMBUTAN	H. Saiful Arif, S. H.

WAKTU	KEGIATAN	CATATAN PROSES
	KEDUA	<p>Wakil Bupati Kepulauan Selayar</p> <p>Wakil Bupati dalam sambutan pembukanya menyampaikan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, Saiful Arif mengatakan, kita semua dituntut untuk proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat.</p> <p>"Atas nama pemerintah dan pembina PPID utama Kabupaten Kepulauan Selayar, saya mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh seluruh PPID Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memberikan informasi publik,"</p> <p>Saat ini kata Saiful Arif PPID Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki status cukup informatif. Prestasi itu kata dia patut disyukuri, akan tetapi tidak boleh berpuas diri.</p> <p>"Kita harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta status PPID kita menjadi lebih lagi, bahkan menjadi informatif,"</p> <p>Terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah Daerah, Saiful Arif berharap PPID tidaklah menjadi beban, namun justru PPID bisa berlomba-lomba memberikan informasi kepada masyarakat.</p> <p>"Mari kita bangun PPID dengan tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Mengubah pola pikir masyarakat kita adalah kewajiban kita, untuk itu mari kita bangun dan mempromosikan daerah kita melalui informasi - informasi cepat dan tepat akurat akuntabel,"</p> <p>Sebagai bukti implementasi kepada masyarakat, para PPID pelaksana dan operator PPID masing – masing OPD, diminta wajib membuat laporan tahunan kegiatan pengelolaan keterbukaan informasi publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian selaku PPID utama.</p> <p>Akhirnya dengan ucapan “<i>Bismillahirrahmanirrahim</i>” seraya berharap ridha dari Allah SWT, Acara Lokakarya Optimalisasi Kinerja PPID Kabupaten Kepulauan Selayar, saya nyatakan di buka dengan resmi.</p>
10.00 Wita	ISTIRAHAT	Coffee Break

WAKTU	KEGIATAN	CATATAN PROSES
10.15 Wita	USAID ERAT	<p>Baharuddin Solongi Fasilitator Usaid Erat</p> <p>Setelah seremoni pembukaan, Kembali Baharuddin mengarahkan acara dengan mengecek jumlah kehadiran para Admin PPID masing-masing OPD, Lanjut sedikit memaparkan secara teknis pelaksanaan Lokakarya ini yang akan dilaksanakan selama Dua Hari 12- 13 Desember 2024, baik materi yang akan diterima oleh para peserta maupun narasumber yang akan terlibat dalam lokakarya ini.</p> <p>Kemudian ia mempersilahkan Kabid Humas Diskominfo untuk sebagai narasumber pertama untuk memaparkan materinya.</p>
PAPARAN MATERI DARI PARA NARASUMBER		
	MATERI KESATU	<p>Andi Sandra Esty Abriany, S. E., M M. Kabid Humas Diskominfo - SP</p> <p>Tema Materi : Progres PPID Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar</p> <p>Kabid Humas Andi Esty memaparkan kilas balik progres perkembangan PPID Pemkab Kepulauan Selayar sejak Tahun 2022, dimana status PPID saat itu dinilai tidak informative, sementara pada Tahun 2023 Status PPID Cukup Informatif.</p> <p>Kabid Humas juga menyampaikan beberapa Kegiatan yang telah Dilaksanakan Bidang Humas dalam rangka mengoptimalkan keterbukaan informasi melalui PPID yakni: Bimtek Peningkatan Kapasitas PPID dan Penyusunan DIP, Uji Konsekuensi, Penetapan DIP (Daftar Informasi Publik) serta dilakukannya Monitoring dan Evaluasi dan presentasi di Komisi Informasi.</p> <p>Disampaikan Pula bahwa sejak Tahun 2023 Bidang Humas Diskominfo telah menyediakan Ruang Pelayanan Informasi Publik dan Website PPID</p> <p>Terakhir dikesempatan ini juga Kabid Humas merinci Jumlah permintaan Informasi Publik yang masuk</p>
	TANYA JAWAB	<p>Pengarah Acara Baharuddin Solongi memandu proses tanya jawab dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya ;</p> <p>1. Sudirman (Dinas Pekerjaan Umum)</p>

WAKTU	KEGIATAN	CATATAN PROSES
		<ul style="list-style-type: none"> - Menanyakan apakah Admin PPID harus dari ASN atau Non ASN, - Apakah memungkinkan OPD untuk menganggarkan ruangan khusus PPID <p><i>Tanggapan Narasumber :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada prinsipnya Tenaga Admin PPID diharapkan dari tenaga ASN, begitupun dengan ruangan PPID sangat diharapkan masing-masing OPD menyiapkan ruangan khusus pelayanan Informasi Informasi Publik dengan memperhatikan kebutuhan peyandang disabilitas. <p>2. Dinas Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya tanggungjawab dan pemahaman para pihak terhadap di dinas pendidikan atas urgensi Layanan Informasi <p><i>Tanggapan Narasumber :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Akan dilakukan sosialisasi ke masing-masing OPD dan mengimbau untuk lebih banyak mencari refrensi terkait layanan informasi public.
	MATERI KEDUA	<p>Fauziah Erwin, SH. CLA Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>Tema Materi : Pelayanan Informasi Publik yang Berkeadilan</p> <p>Mengawali materinya dengan menjelaskan apa itu informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.</p> <p>Beberapa dasar hukum berkaitan dengan layanan informasi publik diantaranya ;</p> <p>Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU 14/2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.</p>

WAKTU	KEGIATAN	CATATAN PROSES
		<p>Dipaparkan juga Latar belakang lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desakan sangat kuat tentang perlunya pemberantasan KKN 2. Desakan kuat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 3. Desakan kuat agar Republik ini memiliki pers yang berkualitas 4. Desakan kuat terhadap upaya pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu 5. Desakan kuat atas semakin pentingnya perlindungan konsumen 6. Desakan kuat terhadap pengelolaan SDA berbasis daya dukung ekosistem dan kepentingan masyarakat <p>Kuatnya desakan-desakan tersebut menuntut adanya pemerintahan yang semakin terbuka dan transparan.</p> <p>Dilanjutkan pemaparan bagaimana Hak atas informasi, apa saja sanksi pidana jika tidak dilaksanakan, batasan informasi public, tugas dan fungsi Komisi Informasi, bagaimana batasan informasi public, serta dijelaskan secara garis besar mengenai Badan Publik Desa. Terkait Badan Publik Desa, dipaparkan bagaimana kewajiban Pemerintah Desa terkait keterbukaan informasi Desa, peran Pemkab dalam pengelolaan Informasi Desa, serta panduan singkat penyajian informasi yang aksesibel bagi para Difabel.</p>
	TANYA JAWAB	<p>Pengarah Acara, Baharuddin Solongi memandu proses tanya jawab dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Meminta pemateri menyampaikan contoh-contoh kasus pidana terkait pelayanan informasi publik. <p><i>Tanggapan Narasumber :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pemateri menceritakan kasus sengkata pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemkot Makassar yang tidak menindaklanjuti hasil putusan Komisi Informasi Provinsi sehingga kasus tersebut berlanjut pada menjadi kasus pidana.</i>
12.00 Wita	ISTIRAHAT	Coffee Break / Ishoma
14.00 Wita		Baharuddin Solongi selaku Pengarah Acara memandu kegiatan lokakarya dengan memberi kesempatan kepada Narasumber Dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Fauziah Erwin, SH. CLA untuk melanjutkan materinya ;

WAKTU	KEGIATAN	CATATAN PROSES
	LANJUTAN MATERI KEDUA	<p>Ketua Komisi Informasi Publik menyampaikan Catatan Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun 2021-2023 antara lain :</p> <p>Sarana Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedia Formulir Keberatan secara online. • Belum menyediakan berita acara atau tanda terima penyerahan dokumen. • Belum menyediakan akses yang mudah bagi Disabilitas <p>Digitalisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki aplikasi satu data indonesia. • Walidata belum menyebarkan Data ke Portal Satu Data Indonesia • Belum memiliki Aplikasi Layanan Informasi Publik berbasis Android. • Belum memiliki aplikasi berbasis website terkait penggunaan anggaran secara real time yang dapat diakses. <p>Sementara untuk Jenis Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum mengumumkan LHKPN Pejabat Eselon II yang disamakan dilingkungan Pemkab Selayar. • Belum mengumumkan jumlah dan persentase yang wajib LHKS dalam lingkup Pemkab Selayar. • Beberapa Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa belum diumumkan di Website seperti Berita Acara Pemberian Penjelasan, Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding, Berita Acara Penetapan atau pengumuman Pemenang Pemilihan dan Surat Perjanjian Swakelola, Surat Jaminan Pemeliharaan, Surat Tagihan, Surat Perintah Pencairan Dana, Laporan Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Hasil Pekerjaan, dan lain-lain. • Beberapa dokumen Kebijakan atau Peraturan belum disediakan seperti masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk, Naskah Akademik, Tahap perumusan peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah dibentuk. • Belum mengumumkan Laporan realisasi anggaran PPKD. • Belum mengumumkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (LKPD) tahun 2022. • Belum menyediakan Pedoman Pengelolaan administrasi, kepegawaian, dan keuangan. <p>Sementara untuk Kualitas Informasi yang disajikan:</p>

WAKTU	KEGIATAN	CATATAN PROSES
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum melakukan pemutakhiran DIP. • Belum menetapkan informasi berkala 2022 menjadi informasi setiap saat 2023. • Akun Media Sosial Pemkab. Selayar belum aktif menyampaikan informasi publik (Rencana Program, Laporan Keuangan, Laporan Layanan Informasi Publik, dll) <p>Materi dilanjutkan tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Mekanisme Penyusunan Daftar Informasi Publik.</p> <p>Mengenai standar layana informasi dijelaskan landasan filosofis dan yuridis, Informasi Publik, Komisi Informasi, Pejabat Publik, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, Pemohon Informasi, Pengguna Informasi, Kelembagaan PPID, Tugas PPID Utama, Kewenangan PPID Utama, Tugas PPID Pelaksana, dan 7 Standar Layanan Informasi Publik.</p>
	TANYA JAWAB	<p>Usai paparan materi, narasumber kemudian mempersilahkan para peserta mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Daftar Informasi yang dikecualikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Permukiman Menanyakan terkait kasus penipuan dengan yang diduga kontakannya didapatkan dari dokumen pengadaan barang dan jasa yang merupakan DIP. <p><i>Tanggapan narasumber:</i> <i>Menegaskan untuk diperjelas dulu dari pihak korban, karena kontak No. HP termasuk Informasi yang dikecualikan.</i></p> <p>Dilanjutkan dengan pemaparan tentang Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik, Narasumber memaparkan informasi, sekaitan dengan apa saja yang tidak dapat diberikan Badan Publik, Informasi Publik yang wajib dibuka.</p>
05.00 Wita	SESI HARI PERTAMA DITUTUP	
Jumat, 13 Des 2024 09.00 Wita	HARI KEDUA	Fasilitator USAID ERAT Baharuddin Solongi selaku pengarah acara didampingi membuka sesi hari kedua pelaksanaan kegiatan Lokakarya dan mempersilahkan Narasumber Fauziah Erwin, SH. CLA
	LANJUTAN MATERI	<p>Narasumber kembali melanjutkan materi hari pertama tentang Mekanisme Penyusunan Daftar Informasi Publik</p> <p>Informasi Publik Yang Wajib Dibuka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkala (Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, minimal 6 bulan sekali)

WAKTU	KEGIATAN	CATATAN PROSES
		<ul style="list-style-type: none"> • Setiap saat (Informasi yang wajib tersedia Setiap Saat) • Serta merta (Informasi Yang Wajib Diumumkan Serta Merta) <p>Urgensi Daftar Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik • Memudahkan petugas informasi dalam melayani permohonan informasi. • Digunakan untuk membantu penyusunan database informasi dan mengetahui informasi apa saja yang dikuasai serta keberadaaan informasi tersebut di unit/satuan kerja, karena sering kali masing-masing unit/satuan kerja di dalam Badan Publik tidak mengetahui informasi apa yang berada di unit/satuan kerja lain • Memudahkan masyarakat saat mencari informasi dan menginformasikan kepada publik mengenai informasi apa saja yang berada di Badan Publik. <p>Tahap penyusunan daftar informasi publik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPID Pelaksana Menyusun usulan DIP terhada informasi yang dihimpun dari seluruh bagian • PPID Pelaksana Menyampaikan Usulan DIP kepada PPID Utama • PPID Utama Melakukan telaah dan klasifikasi informasi • PPID Utama Meminta persetujuan Atasan PPID terhadap DIP yang akan ditetapkan • Atasan PPID Menetapkan DIP dalam bentuk Keputusan <p>Narasumber memperlihatkan contoh Daftar Informasi Publik</p>
	TANYA JAWAB	<p>Ditengah paparan materi, Narasumber kemudian mempersilahkan para peserta mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Daftar Informasi Publik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertanyakan terkait persuratan dan permintaan informasi yang perlu direspon dalam 10 hari kerja, apa yang mesti dilakukan OPD untuk menyebarluaskan informasinya? <p><i>Tanggapan Narasumber:</i> <i>Harus minimal adanya surat edaran oleh masing-masing OPD</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sudirman (Dinas Pekerjaan Umum) Menanyakan bagaimana menyakinkan atasan yang keberatan untuk menyerahkan DIP?

WAKTU	KEGIATAN	CATATAN PROSES
		<p><i>Tanggapan Narasumber: Yang dapat dilakukan ialah menyakinkan dengan perintah tertingginya, salah satu contohnya Menteri dalam Negeri bersurat kepada Gubernur.</i></p>
		<p>Narasumber melanjutkan dengan Materi Uji Konsekuensi</p> <p>Siapa Yang Melakukan pengujian konsekuensi?</p> <p>Pasal 19 UU KIP: “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.</p> <p>Kapan Uji Konsekuensi dilaksanakan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active Disclosure Sebelum adanya permohonan informasi publik. • Passive Disclosure Pada saat adanya permohonan informasi publik. • Dispute Pada saat sengketa informasi berlangsung, atas perintah Majelis Komisioner. <p>Tahapan PengujianKonsekuensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPID melakukan verifikasi dokumen yang akan dilakukan pengujian konsekuensi • PPID berkoordinasi dengan PPID Pelaksana untuk membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan • Pertimbangan tertulis harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Undang undang lainnya. (ekonomi, sosial, politik, budaya, dan/atau keamanan negara) • Hasil pertimbangan tertulis, disampaikan kepada Atasan PPID untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani Atasan PPID <p>Bagaimana Melaksanakan Uji Konsekuensi?</p> <p>Mengidentifikasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan apabila dibuka atau kepentingan yang akan dilindungi dengan menutup informasi. (BAGI PUBLIK)</p>

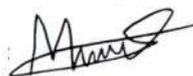
WAKTU	KEGIATAN	CATATAN PROSES
		<p>Mengidentifikasi dasar hukum (baik UU KIP maupun UU lain) yang mendukung alasan menutup informasi tersebut berdasarkan konsekuensi negatif. (Sebutkan Pasal dan ayat) Jika ada, apakah dasar hukum pengecualian tersebut masih relevan?</p> <p>Membuat kesimpulan: buka jika terbukti tidak ada dasar hukum buka jika terbukti ada dasar hukum tapi sudah tidak relevan tutup jika terbukti ada dasar hukum dan relevan</p> <p>Selanjutnya Narasumber menjabarkan Panduan Uji Konsekuensi</p>
11.00 Wita	ISTIRAHAT	Coffee Break / Ishoma
14.00 Wita		<p>Fasilitator USAID ERAT Baharuddin Solongi selaku pengarah acara kembali membuka kegiatan setelah istirahat, dan sedikit mengajak para peserta mengulas materi-materi yang telah disampaikan para narasumber, selanjutnya mempersilahkan narasumber menyampaikan lanjutan materinya.</p>
	MATERI	<p>Fauziah Erwin, SH. CLA Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>Tema Materi : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</p> <p>Dijelaskan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pengguna informasi public yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.</p> <p>Mengapa terjadi sengketa informasi publik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penolakan atas permohonan Informasi berdasarkan Alasan Rahasia 2. Permohonan Informasi tidak ditanggapi 3. Permohonan Informasi ditanggapi tidak sebagai mana yang diminta 4. Permohonan Informasi tidak dipenuhi 5. Pengenaan Biaya tidak wajar 6. Penyampaian Informasi melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP <p>Penyelesaian sengketa dilakukan dengan dua cara yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Jalur Mediasi jika informasi yang disengketakan adalah Informasi yang terbuka, tetapi jika Mediasi gagal maka diselesaikan melalui Ajudikasi. 2. Melalui persidangan (Ajudikasi Nonlitigasi), jika Informasi yang disengketakan adalah Informasi yang dikecualikan. <p>Keuntungan Memilih Jalur Mediasi :</p>

WAKTU	KEGIATAN	CATATAN PROSES
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Penyelesaian Sengketa lebih cepat; 2. Biaya lebih murah; 3. Bersifat Informal (para pihak yang menentukan); 4. Kerahasiaan terjamin; 5. Tidak ada yang kalah (semua menang); 6. Hasil Kesepakatan bisa diperbaiki sebelum putusan final dibacakan; 7. Bersifat akhir dan mengikat. <p>Penyelesaian Sengketa IP Melalui Proses Ajudikasi Persidangan Majelis Komisioner Mengawali Pemeriksaan Pendahuluan Terhadap 3 (tiga) Hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Komisi Informasi Terhadap Sengketa a quo (absolut maupun relatif); 2. Kedudukan hukum / legal standing para pihak atau kuasanya. 3. Skema waktu pengajuan permohonan (10+7) Hari Kerja (HK). Pengajuan keberatan kepada Atasan PPID (30) HK, Pengajuan Sengketa ke Komisi Informasi (14) HK.
	TANYA JAWAB	<p>Sebelum melanjutkan materinya, Narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan / tanggapan dari materi yang disampaikan</p> <p>Pertanyaan dari dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudirman Dinas Pekerjaan Umum <p>Menyampaikan Apresiasi terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber, dirinya tidak menyangka jika ternyata sekelumit ini keterbukaan informasi, sehingga bisa sampai pada sengketa dan pidana.</p> <p><i>Tanggapan Narasumber</i> <i>Sebagai penyelenggara negara harus taat hukum dan seharusnya paham dengan keterbukaan informasi publik.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sulipno Pratono Inspkedorat Kabupaten <p>Adakah standar yang bisa menjadi acuan untuk membuat pembatasan akses pemohon informasi, meminta pemateri lebih banyak menyampaikan contoh kasus sengketa informasi.</p> <p><i>Tanggapan Narasumber</i></p>

WAKTU	KEGIATAN	CATATAN PROSES
		<p><i>Disebutkan bahwan Sampai hari ini lebih dari 700 permohonan sengketa informasi yang masuk di Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi selatan.</i></p> <p><i>Sehubungan dengan batasan pemohon informasi, berpedoman pada undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomrasi Publik.</i></p>
	<p>PENEGASAN KETUA KOMISI INFORMASI PROV. SULAWESI SELATAN</p>	<p>Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan kembali membuka dan mengcross chek hasil Isian SAQ Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, dan menegaskan dinas terkait secara aktif menindaklanjuti catatan dan rekomendasi dari tim Komisi Informasi, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi Serta Merta di BPBD, Membuat Peringatan Dini yang ditempel dikantor- kantor dan tempat umum - Mengumumkan LHKPN Para Pejabat Pemkab Selayar - Connetivitas Sistem Antara Inspektorat Kabupaten dan KPK - Dinas Keuangan untuk melengkapi Lampiran Perda APBD - Laporan Realisasi Anggaran per OPD - Sekwan melampirkan Perda Inisiatif - BKPSDM melampirkan Peraturan Bupati tentang Kepegawaian - Dinas Keuangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan - Bappelitbangda Surat perjanjian dan kerjasama dengan piha ketiga - Dan beberapa catatan lainnya
	<p>PENGARAH ACARA</p>	<p>Diakhir Acara, Baharuddin Solongi selaku pengarah acara meminta peserta untuk melakukan Post Test, selanjutnya dirinya secara resmi menutup secara resmi kegiatan Lokakarya Optimalisasi Kinerja PPID Kabupaten Kepulauan Selayar dengan ucapan Alhamdulillah teriring doa semoga segala bentuk aktivitas kita dilancarkan dan sukse. Amin</p>
<p>Lokakarya Optimalisasi Kinerja PPID Kabupaten Kepulauan Selayar resmi di Tutup</p>		

Benteng, 13 Desember 2024

Notulen,



MUKMININ

**GAMBAR/
FOTO-FOTO
KEGIATAN**

Lokakarya Optimalisasi Kinerja PPID Tahun 2024



